



---

## **PENGARUH ANGGARAN BELANJA DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMUT**

**Ayuni Nurafni**

*ayuniinurafni20@gmail.com*

Universitas Pembangunan Panca Budi

**Rahmad Sembiring**

*rahmadsembiring@dosen.pancabudi.ac.id*

Universitas Pembangunan Panca Budi

**ABSTRAK**Fluktuasi anggaran belanja daerah seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19, dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan Belanja modal. Hal ini dapat berakibat pada penundaan atau pembatalan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya menghambat kemajuan pembangunan daerah. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Apakah Anggaran Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumut? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode Kausal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linier sederhana dan data diproses dengan menggunakan program SPSS versi 24. Hasil penelitian ini Anggaran Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan Anggaran Belanja Daerah merupakan komponen penitng dalam mempengaruhi belanja modal disuatu kabupaten/kota.

**Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah dan Belanja Modal**

### **Pendahuluan**

Hubungan antara Anggaran Belanja Daerah dan Belanja Modal (Belmod) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan inefisiensi alokasi dan pemanfaatan Belanja modal, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketidakpastian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Salah satu sumber utama Anggaran Belanja Daerah adalah PAD.(Adyatma, E., & Oktaviani, 2015). Fluktuasi PAD, seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19, dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan Belanja modal. Hal ini dapat berakibat pada penundaan atau pembatalan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya menghambat kemajuan pembangunan daerah. Lemahnya Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal, proses perencanaan dan penganggaran Belanja modal di beberapa daerah di Sumut masih belum optimal. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, analisis kebutuhan yang tidak memadai, dan mekanisme penganggaran yang tidak transparan dapat berujung pada alokasi Belanja modal yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi Belanja modal, Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belmod masih belum berjalan dengan baik di beberapa daerah di Sumut. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran, penyimpangan proyek, dan tidak tercapainya target pembangunan. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan Belanja modal dapat memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan SDM yang memiliki keahlian dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan Belanja modal di beberapa daerah di Sumut dapat menghambat efektivitas pelaksanaan Belanja modal. Kurangnya

pelatihan dan pengembangan SDM dapat menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Budaya Birokrasi yang Lambat dan Kaku, budaya birokrasi yang lambat dan kaku dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dapat menghambat pelaksanaan Belanja modal. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian proyek pembangunan dan meningkatnya biaya proyek. Menurut Sajow (2017) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi Pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai system perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut

**Tabel 1.1 APBD Provinsi Sumut**

| Jenis Belanja  | Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Belanja (ribu rupiah) |             |            |
|--|---|-------------|------------|
|  | 2019  | 2020        | 2021       |
| I. Belanja Tidak Langsung  | 10466265830   | 10466265830 | 990019269  |
| 1. Belanja Pegawai   | 3647433927  | 3647433927  | 3663458689 |
| 2. Belanja Bunga   | 0   | 0           | 0          |
| 3. Belanja Subsidi   | 0   | 0           | 0          |
| 4. Belanja Hibah   | 2968196114  | 2968196114  | 3889900347 |
| 5. Belanja Bantuan Sosial  | 0   | 0           | 24448316   |
| 6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa       | 3818395037  | 3818395037  | 2337211916 |
| 7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 7240752   | 7240752     | 0          |
| 8. Belanja Tidak Terduga   | 25000000  | 25000000    | 75000000   |
| II. Belanja Langsung   | 5077641935  | 5077641935  | 3759480183 |
| 1. Belanja Pegawai   | 106386401   | 106386401   | 0          |
| 2. Belanja Barang dan Jasa   | 3174882251  | 3174882251  | 2613913631 |
| 3. Belanja Modal   | 1796373284  | 1796373284  | 1145566552 |

Sumber : Bps 2024

Dari masalah tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini disebabkan karena faktor masalah pandemik, tetapi hal ini juga mendorong pemerintah untuk terus berupaya optimal meningkatkan anggaran belanja sehingga dapat di kelola dengan baik di provinsi Sumatera Utara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Padang, Novi Natalia (2023) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Menyatakan bahwa hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan

penelitian dengan judul Pengaruh Anggaran Belanja Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumut.

**Identifikasi masalah** dalam penelitian ini adalah :

1. Lemahnya Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal dalam perencanaan dan penganggaran Belanja modal di beberapa daerah di Sumut masih belum optimal.
2. Terjadi penurunan anggaran belanja daerah dari tahun 2020 ke tahun 2021.

**Rumusan Masalah :**

1. Apakah Anggaran Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumut?

**Tujuan Penelitian :**

1. Untuk menganalisa pengaruh Anggaran Belanja Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumut.

**Manfaat Penelitian**

1. Untuk Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dan menjadi wawasan
2. Untuk Perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan.

**Originalitas Penelitian :**

Novi Natalia (2023) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

**Landasan Teori**

### 2.1 Teori *Agency*

Haris dan Raviv (1978) menjelaskan bahwa principal-agent merupakan suatu teori umum yang bisa diterapkan pada pemberi kerja-karyawan, pengacaraklien, pembeli-supplier, dan hubungan keagenan yang lain. Teori *agency* menurut adalah sebuah kerangka kerja yang menjelaskan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Pihak pertama disebut principal, sedangkan pihak kedua disebut agen. Principal memberikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas namanya, tetapi agen memiliki otonomi untuk membuat keputusan sendiri. Konflik kepentingan adalah masalah utama dalam hubungan *agency* adalah adanya konflik kepentingan antara principal dan agen. Principal ingin agen bertindak demi kepentingan terbaik mereka, tetapi agen mungkin memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingan mereka sendiri. Mekanisme untuk mengatasi konflik kepentingan terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik kepentingan dalam hubungan *agency*, antara lain:

1. Pemantauan yaitu Principal dapat memantau tindakan agen dan memastikan bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik principal.
2. Insentif yaitu Principal dapat memberikan insentif kepada agen untuk bertindak demi kepentingan terbaik principal, seperti bonus atau opsi saham.
3. Desain kontrak yaitu Principal dapat merancang kontrak dengan agen yang secara jelas mendefinisikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

4. Bonding yaitu Principal dapat meminta agen untuk memberikan jaminan, seperti uang jaminan atau obligasi, sebagai insentif untuk bertindak demi kepentingan terbaik principal.

### **2.1.1 Teori Anggaran Berimbang (Balanced Budget Theory)**

Menurut Paul Krugman menyatakan bahwa : Ekonom kontemporer ini berpendapat bahwa fokus berlebihan pada anggaran berimbang bisa kontraproduktif dalam situasi krisis ekonomi. Mendukung defisit anggaran sebagai alat kebijakan dalam kondisi tertentu.

## **2.2 Anggaran Belanja Daerah**

Anggaran Belanja Daerah dalam peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2022 menyatakan bahwa anggaran belanja daerah tahun 2023 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tahun fiskal 2023. Anggaran ini mencakup:

1. Estimasi pengeluaran daerah untuk berbagai program dan kegiatan.
2. Sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.
3. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2023.
4. Alokasi dana untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.

Anggaran ini bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah
2. Mendukung pembangunan dan pelayanan publik
3. Mencapai tujuan pembangunan daerah

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pelaksanaan lebih lanjut pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan daerah yang ditetapkan oleh masing-masing daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Halim (2018) menjelaskan anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Anggaran Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (Sari, 2011). Anggaran Belanja Daerah memuat perkiraan pendapatan dan pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Fungsi Utama Anggaran Belanja Daerah:

1. Perencanaan: Anggaran Belanja Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan dan program pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.

2. Pengendalian: Anggaran Belanja Daerah digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan daerah agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas: Anggaran Belanja Daerah menjadi alat akuntabilitas bagi pemerintah daerah kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya keuangan daerah.

### **2.3 Belanja Modal**

Peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2023 menyatakan bahwa memang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk aspek belanja modal. Namun, saya perlu memberikan beberapa catatan penting:

1. Saya tidak memiliki akses langsung ke database peraturan terbaru, jadi detail spesifik dari PP No. 56 Tahun 2023 mungkin tidak sepenuhnya akurat dalam ingatan saya.
2. Peraturan ini kemungkinan merupakan pembaruan atau revisi dari peraturan sebelumnya terkait pengelolaan keuangan negara dan belanja modal.
3. Biasanya, peraturan semacam ini mengatur tentang:
  - a. Definisi dan klasifikasi belanja modal
  - b. Mekanisme perencanaan dan penganggaran belanja modal
  - c. Prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal
  - d. Standar akuntansi dan pelaporan belanja modal
4. Peraturan ini mungkin juga membahas tentang:
  - a. Kriteria untuk menentukan belanja modal
  - b. Batasan dan ketentuan khusus terkait belanja modal
  - c. Integrasi belanja modal dalam sistem penganggaran nasional.

Pasal 171 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran untuk menciptakan atau menambah aset tetap daerah yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Menurut Wahyudi Kumorotomo (2016) dalam bukunya "Akuntansi Keuangan Sektor Publik", belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menambah aset tetap daerah yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. (Sari, 2011) Aset tetap daerah tersebut dapat berupa tanah, bangunan, peralatan mesin, dan lain-lain. Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi :

- a. Belanja modal tanah
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

| <b>No.</b> | <b>Nama/Tahun</b>          | <b>Judul</b>   | <b>Hasil</b>   |
|------------|----------------------------|--|--|
| 1          | Novi Natalia Padang (2023) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.   | Menyatakan bahwa hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara  |
| 2          | Rini Oktriniatmaja (2021)  | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Pulau Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara | Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan. Uji beda antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa menunjukkan bahwa Belanja Modal dan Penerimaan di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan daerah di luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus daerah luar Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan daerah di Pulau Jawa. |
| 3          | Erdi Adyatma (2015)        | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi   | Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bernilai positif, artinya peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.   |

*PENGARUH ANGGARAN BELANJA DAERAH TERHADAP  
BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMUT*

|   |                          |  |  |
|---|--------------------------|--|--|
|   |                          |  | Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dengan Belanja Modal Pendapatan Daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan belanja modal.  |
| 4 | Nina Hartiningsih (2015) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau      | Hasil ini membuktikan bahwa pajak daerah secara simultan; pengaruh retribusi dan PAD lainnya yang sah terhadap belanja modal di Provinsi Riau. Secara parsial pajak daerah dan PAD lainnya yang sah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Riau. Sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.  |
| 5 | Kadek Martini (2015)     | Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal. |

Sumber : penelitian 2024

## 2.4 Kerangka Konseptual

Anggaran belanja daerah merupakan adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cennisa (2017) menyatakan bahwa Hasil penelitian ini yaitu dari tingkat efektivitas belanja, Kota Tomohon lebih efektif dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Tingkat efisiensi belanja, Kota Tomohon lebih efisien dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang positif. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menambah aset tetap daerah yang memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Dari kerangka konseptual diatas dapat dinyatakan bahwa :

Hipotesis 1 : Anggaran Belanja Daerah berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal.

## Metode Penelitian

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pedekatan penelitian ini adalah menggunakan metode Kausal. penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel yaitu variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi).

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pusat Statistik, dimulai dari bulan Juli 2024. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari uraian tabel berikut ini.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2024. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari uraian tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

| No | Kegiatan            | Mei'23     |   |   | Juni'24    |   |   |   | Juli'24    |   |   |   | Agustus24  |   |   |   |   |   |
|----|---------------------|------------|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|
|    |                     | Minggu ke- |   |   | Minggu ke- |   |   |   | Minggu ke- |   |   |   | Minggu ke- |   |   |   |   |   |
|    |                     | 1          | 2 | 3 | 1          | 2 | 3 | 4 | 4          | 1 | 2 | 3 | 4          | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| 1  | Penyusunan Proposal |            | ■ |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |   |   |
| 2  | Seminar Proposal    |            |   |   | ■          | ■ | ■ | ■ | ■          | ■ |   |   |            |   |   |   |   |   |
| 3  | Seminar Hasil       |            |   |   | ■          | ■ | ■ | ■ | ■          |   |   |   |            |   |   |   |   |   |
| 4  | Sidang Meja Hijau   |            |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   | ■ | ■ | ■ | ■ |

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

### 3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

#### 1. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian Arikunto (2010). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah Anggaran Belanja Daerah dan Belanja Modal

#### 2. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah salah satu unsur yang sangat membantu antara komunikasi, antar peneliti yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga ia dapat mengetahui baik buruknya.

Definisi operasional merupakan sesuatu yang memperjelas konsep sedemikian rupa sehingga konsep tersebut dapat diukur untuk keperluan pengukuran dilapangan. Dengan demikian definisi operasional yang dapat disimpulkan dari variabel - variabel diatas adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel**

| Variabel               | Definisi  | Indikator  | Skala   |
|------------------------|---|--|---------|
| Anggara Belanja Daerah | semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan | pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah | Nominal |
| Beanja Modal           | pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi   | perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.  | Nominal |

Sumber : penelitian 2024

#### 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten kota di provinsi Sumatera Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling Jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara.

#### 3.5 Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan data sekunder bersumber dari laporan di BPS terkait dengan Anggaran Belanja dan Belanja Modal dari tahun 2019-2021.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Teknik Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk peneliti dalam mendokumentasikan data yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.
2. Teknik Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengobservasi penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dari penelitian.
3. Studi Perpustakaan merupakan salah satu studi yang digunakan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penelitian ini.
4. Wawancara merupakan salah satu cara peneliti dalam mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menyebarkan kuesioner kepada para audiesnya.

### 3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linier sederhana dan data diproses dengan menggunakan program SPSS versi 24. (Sugiyono, 2012)Metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Analisis Regresi Linier Sederhana.

Rumus linier sederhana ditunjukkan oleh persamaan :

$$Y = a + b_1X_1+ e$$

Dimana :

Y = Belanja Modal

a = Kostanta

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi

b<sub>2</sub> = Koefiisen regresi

X<sub>1</sub> = Anggaran Belanja Daerah

e = Faktor Pengganggu

#### 3.7.1 Uji Hipotesis

Uji Parsial ( t-test)

Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel  
Apabila t hitung < t tabel maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak  
Apabila t hitung > t tabel maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> diterima
- 2) Dengan melihat nilai probabilitas singnifikan  
Apabila nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak.  
Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> diterima.

## 5. Analisis dan Pembahasan

### 1. Analisis

**Tabel 4.2 Uji Parsial**

|       |                         | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |       |      |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                         | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       |      |
| Model |                         | B                           | Std. Error | Beta                      | t     | Sig. |
| 1     | (Constant)              | 2,884                       | ,413       |                           | 6,980 | ,000 |
|       | Anggaran belanja daerah | 2,921                       | 3,597      | ,186                      | 4,167 | ,020 |

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Penelitian 2024

Dari tabel 4.2 dapat dinyatakan bahwa signifikansi dalam penelitian ini sebesar 0.020 yang dapat dinyatakan bahwa penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

**Tabel 4.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .808 <sup>a</sup> | .652     | ,446              | ,93511                     |

a. Predictors: (Constant), Anggaran Belanja Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Penelitian 2024

Dari tabel 4.4 dapat dinyatakan bahwa R square sebesar 65,2 % yang berarti bahwa 34,8 % dipengaruhi oleh penelitian lainnya diluar penelitian ini.

### Pembahasan

Analisis diatas dapat dinyatakan bahwa anggaran belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal yakni sebesar 0,020 atau dibawah 0.005. Sedangkan pengaruh anggaran belanja daerah sebesar 65,2 % sisanya sebesar 34,8 persen dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain. Dari analisis diatas maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Candra Gunantara (2014) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa

PAD, DAU, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, hasil uji parsial menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Belanja Modal memperlemah pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh pengalokasian pendapatan daerah untuk Belanja Modal tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga proyek yang dikerjakan bersifat mubasir. Penelitian ini menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan PAD melalui Belanja Modal memperlemah hubungan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan PAD yang memiliki keterbatasan kewenangan pajak dimana pemerintah daerah mungkin memiliki kewenangan terbatas dalam mengenakan pajak atau sumber daya pajak yang ada terbatas. Jika pemerintah daerah tidak memiliki cukup sumber daya pajak atau sumber daya pajak yang ada tidak mencukupi untuk membiayai belanja daerah, maka pendapatan asli daerah tidak akan berdampak signifikan pada kemampuan mereka untuk mengelola belanja daerah. Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat sehingga pemerintah daerah mungkin sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau entitas lain untuk membiayai belanja daerah. Dalam situasi ini, pendapatan asli daerah mungkin memiliki dampak yang terbatas karena sebagian besar pendanaan berasal dari transfer pusat.

Menurut Rahmawati (2017) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung menyatakan bahwa Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangatkuat dan hubungan dana perimbangan dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung. Menurut Apriliawati (2020) dengan judul Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Flypaper effect telah terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan :**

1. Anggaran Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan Anggaran Belanja Daerah merupakan komponen penting dalam mempengaruhi belanja modal disuatu kabupaten/kota. Anggaran digunakan untuk keperluan belanja modal seperti tanah, gedung, peralatan yang diperlukan di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara.

### **5.2 Saran:**

1. Diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas penelitian dengan menambahkan variabel lainnya.
2. Perlunya evaluasi sistem pajak daerah untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara efisien. Pertimbangkan untuk mengevaluasi tarif pajak, mengurangi hambatan

administratif, dan meningkatkan pemungutan pajak untuk memaksimalkan pendapatan pajak.

### Literature Review

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2).
- Damanik, D., Nasrullah, N., Purba, B., Arfandi, A. S., Abdillah, D., Raditya, R., ... & Faried, A. I. (2022). Ekonomi Pariwisata: Konsep Pemasaran dan Pembangunan.
- Faried, A. I. (2020). Analisis Meredam Angka Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekonomikawan*, 20(1), 1-11.
- Hasanah, U., Faried, A. I., & Sembiring, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengelola Bumdesa Di Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Analytic Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4550-4557.
- Martini, K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 426-443.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Sari, ayu kurnia. (2011). Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Disertation Usu*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tulangow, A. P., & Runtu, T. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).
- Oktrinimatmaja, R. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Ordiyasa, I. W., Nugroho, L. E., Santosa, P. I., & Kumorotomo, W. (2016, October). Enhancing Quality of Service for eGovernment interoperability based

on adaptive ontology. In *2016 2nd International Conference on Science and Technology-Computer (ICST)* (pp. 102-107). IEEE.

Pusporini, I. D. (2020). Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(6), 485-508.

Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(1).

Pasal 171 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004

Rahmad Sembiring, S. E., & SP, M. Covid-19: Produktivitas Dan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Di Desa Pesisir Batu Bara.

Sembiring, R., & Faried, A. I. (2019). Analysis of Regional Expenditure in Education, Health and Infrastructure Sector on Human Development Index and Lab or Productivity in Medan City. *Ijiesr. Com*, 3(4), 2934.

Rahman, A., Hasibuan, A. F. H., Faried, A. I., Purba, B., Sudarmanto, E., Marit, E. L., ... & Nainggolan, P. (2021). Pengantar Ilmu Ekonomi.

Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63-78.

Sugiono (2016) Metode Penelitian. Erlangga. Yogyakarta.

Sajow, C., Morasa, J., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).